

**SKRIPSI**  
**PENGARUH ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN**  
**TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA**  
**TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**  
**DI KOTA BANDA ACEH**



**Disusun oleh:**

**Muhammad Rahmat Wandy**

**NIM: 190604118**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2025 M/1447 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rahmat Wandy

NIM : 190604118

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 26 Agustus 2025

Muhammad Rahmat Wandy

# PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

## Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh

Disusun Oleh

**Muhammad Rahmat Wandy**  
190604118

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat dalam penyelesaian pada program Studi Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si**      **Cut Elfida, S.HI., MA**  
NIP. 197204281999031005      NIP. 19891212023212076

Mengetahui,

Ketua Prodi Studi Ilmu Ekonomi

**Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si**  
NIP. 198601282019031005

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**  
**Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Transparansi**  
**Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**  
**Di Kota Banda Aceh**

Muhammad Rahmat Wandy  
NIM. 190604118

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan  
Program Studi Strata I (S-I) dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 26 Agustus 2025 M  
2 Rabi'ul Awal 1447 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Mengetahui

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si

Cut Elfida, S.HI., MA

NIP.197204281999031005

NIP.19891212023212076

Penguji I

Penguji II

Dr. Maimun, SE., Ak. M.Si

Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak.CA

NIP.197009171997031002

NIP.198307092014032002



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Hafas Furuqani, M.Ec

NIP.198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

## FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Rahmat Wandy  
NIM : 190604118  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi  
E-mail : 190604118@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi

Yang berjudul:

### **Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 26 Agustus 2025

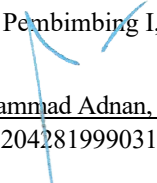
Mengetahui,


Penulis,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Muhammad Rahmat Wandy  
NIM. 190604118

  
Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si  
NIP. 197204281999031005

  
Cut Elfida, S.HI., M.A  
NIP. 19891212023212076

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, berkat *qudrah* dan *iradah*-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh”. Shalawat beriring salam senantiasa penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karna itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si, selaku Ketua Program Studi (Prodi) Ilmu Ekonomi.
3. Hafiz Maulana, SP., S.H.I, selaku Ketua Laboratorium FEBI yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si dan Cut Elfida, S.HI., MA, selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah banyak berkenan meluangkan waktu untuk senantiasa membimbing penulis serta memberikan dorongan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Maimun, SE.,Ak. M.Si dan Cut Dian Fitri,S.E.,M.Si.,Ak.CA, selaku penguji I dan penguji II pada sidang skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf pengajar di Prodi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada seluruh staf dan aparatur desa Gampong Neusu Jaya atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini.
8. Kepada ayahanda terhebat, bapak Ikhwanul Muslem, SE. Saya ingin berterima kasih karena telah berkerja keras, memberikan dukungan, memberikan semangat motivasi sehingga saya mampu menyelesaikan Program Studi sampai selesai.
9. Kepada ibunda tercinta, drh. Helly Okrisya. Terima kasih telah memberikan dukungan moril maupun materil, serta kepercayaan penuh bagi penulis untuk menyelesaikan Program Studi. Terima kasih juga karena selalu melangitkan nama penulis dalam setiap sujud dan doa. Keberhasilan ini bukan semata-mata karena kemampuan penulis, melainkan

berkat ridha Allah SWT yang mengalir melalui doa-doa tulus dari ayah dan bunda. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan menyayangi kalian sebagaimana kalian menyayangi penulis sedari kecil.

10. Terima kasih kepada ketiga adik kandung saya, Muhammad Ridha Wandy, Muhammad Iqbal Wandy dan Nabila Willy yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Program Studi

11. Teruntuk diriku sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah pada saat-saat di mana berhenti terasa lebih mudah dari pada melanjutkan. Kamu telah membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari pada keraguanmu sendiri. Skripsi ini menjadi bukti nyata bahwa kamu mampu menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri dengan harapan semoga yang telah penulis lakukan selama penulisan ini bermanfaat serta mendapat ridha dan maghfirah dari Allah Swt. *Āmīn yā Rabbal- Ālamīn.*

Banda Aceh, 26 Agustus 2025



Muhammad Rahmat Wandy

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Rahmat Wandy  
NIM : 190604118  
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ilmu Ekonomi  
Judul : Pengaruh Alokasi Dana Desa dan  
Transparansi Pengelolaan Dana Desa  
Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota  
Banda Aceh  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si  
Pembimbing II : Cut Elfida, S.HI., MA

Alokasi dana desa bertujuan untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal pemberdayaan dan kegiatan kelembagaan. Pengelolaan keuangan desa yang efektif serta digunakan untuk kepentingan masyarakat, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh alokasi dana desa dan transparansi pengelolaan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, variabel alokasi dana desa memiliki nilai  $t$  lebih besar dari  $t$  tabel ( $2.905 > 1,98580$ ), berarti variabel alokasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, variabel transparansi pengelolaan dana desa ( $X_2$ ) memiliki nilai  $t$  lebih besar dari  $t$  tabel ( $2.527 > 1,98580$ ), berarti variabel transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, secara simultan kedua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Banda Aceh. Hal itu berdasarkan nilai  $F$  hitung sebesar 4.909, nilai ini jauh lebih besar dari  $F$  tabel yaitu 2,70 atau  $F_{hitung} 4.909 > F_{tabel} 2,70$ .

**Kata Kunci:** *Alokasi Dana Desa, Transparansi Pengelolaan Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat.*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ixi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>18</b>
2.1 Kesejahteraan Masyarakat.....	18
2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat .....	18
2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Masyarakat .....	21
2.1.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat .....	21
2.1.4 Langkah-Langkah Mencapai Kesejahteraan Untuk mencapai kesejahteraan.....	22
2.1.5 Langkah Dalam Mencapai Kesejahteraan.....	23
2.1.6 Upaya Mencapai Kesejahteraan .....	25
2.2 Alokasi Dana Desa (ADD).....	26
2.2.1 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD).....	29
2.2.2 Sumber Alokasi Dana Desa.....	33
2.2.3 Pengelolaan Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).....	36
2.3. Transparansi Pengelolaan Dana Desa .....	44
2.3.1 Pengertian Tranpasransi Pengelolaan Dana Desa .....	44
2.3.2 Indikator Transparansi Pengelolaan Dana Desa .....	46
2.4 Penelitian Terkait .....	46
2.5 Keterkaitan Antar Variabel .....	53

2.5.1 Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	53
2.5.2 Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa .....	54
2.6 Kerangka Berpikir .....	54
2.7 Hipotesis.....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	56
3.2 Sumber Data .....	56
3.2.1 Data Primer .....	56
3.3 Populasi dan Sampel .....	56
3.3.1 Populasi .....	56
3.3.2 Sampel.....	57
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	58
3.5 Skala Pengukuran.....	59
3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	59
3.6.1 Variabel Terikat (Dependen).....	60
3.6.1 Variabel Bebas (Independen).....	60
3.7 Uji Kuesioner .....	64
3.7.1 Uji Validitas .....	64
3.7.2 Uji Reliabilitas.....	65
3.8 Metode Analisis Data .....	65
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	65
3.9. Uji Asumsi Klasik.....	66
3.9.1 Uji Normalitas.....	66
3.9.2 Uji Multikolinieritas .....	67
3.9.3 Uji Heteroskedastisitas .....	67
3.10 Analisis Linier Berganda.....	68
3.11 Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	68
3.12 Uji Hipotesis.....	69
3.12.1 Uji T (Parsial).....	69
3.12.2 Uji Stastistik (Uji F) .....	69
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>70</b>
4.1. Gambaran Umum Kota Banda Aceh.....	70
4.2. Karakteristik Responden .....	71
4.2.1. Kriteria Berdasarkan Usia .....	71

4.2.2. Kriteria Berdasarkan Pendidikan .....	72
4.2.3. Kriteria Berdasarkan Jenis Kelamin.....	73
4.2.4. Kriteria Berdasarkan Status.....	73
4.3. Deskripsi Data Penelitian .....	74
4.3.1. Deskripsi Alokasi Dana Desa (X1) .....	74
4.3.2. Deskripsi Transpasransi Pengelolaan Dana Desa (X2) .....	75
4.3.3. Deskripsi Kesejahteraan Masyarakat(Y).....	76
4.4. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	76
4.4.1. Uji Validitas .....	76
4.4.2. Uji Reliabilitas.....	78
4.5. Uji Normalitas dan Multikolonieritas.....	79
4.5.1. Uji Normalitas .....	79
4.5.2. Uji Multikolonieritas .....	81
4.5.3. Uji Heterokedastisitas.....	82
4.6. Analisis Regresi Linier Berganda.....	83
4.6.1. Persamaan Regresi .....	83
4.6.2. Uji Koefisien Korelasi.....	84
4.7. Koefisien Determinasi .....	85
4.8. Uji Hipotesis.....	86
4.8.1. Uji f (Simultan) .....	86
4.8.2. Uji t (Parsial) .....	87
4.9. Pembahasan.....	88
4.9.1. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Banda Aceh .....	88
4.9.2. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Banda Aceh....	89
4.9.3. Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Banda Aceh.....	90
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>95</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terkait.....	3
Tabel 3.1	Skala Likert.....	40
Tabel 3.2	Definisi Operasional Variabel .....	42
Tabel 3.3	Kriteria Interpretasi.....	45
Tabel 4.1	Kriteria Responden Berdasarkan Usia.....	50
Tabel 4.2	Kriteria Responden Berdasarkan Pendidikan .....	50
Tabel 4.3	Kriteria Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	51
Tabel 4.4	Kriteria Responden Berdasarkan Status .....	51
Tabel 4.5	Tanggapan Responden Terhadap Alokasi Dana Desa.....	52
Tabel 4.6	Tanggapan Responden Terhadap Pengelolaan Dana Desa .....	53
Tabel 4.7	Tanggapan Responden Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	53
Tabel 4.8	Hasil Pengujian Validitas .....	54
Tabel 4.9	Hasil Pengujian Reabilitas.....	56
Tabel 4.10	One-Sample kolmogorov-Smirnov Test.....	57
Tabel 4.11	Hasil Pengujian Multikolinieritas .....	58
Tabel 4.12	Hasil Pengujian Regresi.....	59
Tabel 4.13	Korelasi Variabel .....	61
Tabel 4.14	Korelasi Variabel ( $R^2$ ) .....	61
Tabel 4.15	Hasil pengujian Simultan.....	62
Tabel 4.16	Hasil Pengujian t.....	63

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian .....	36
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedestisitas .....	59



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Sejahtera merupakan suatu kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan Makmur, dalam keadaan sehat, dam damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan (Ibrahim dkk, 2023).

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu konsep multiindikator yang menunjukkan ukuran keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Kesejahteraan

masyarakat suatu negara dari sudut pandang ekonomi diukur melalui instrumen pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Sunarti dalam Pradana dkk. (2022), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Kesenjangan dalam kehidupan masyarakat diakibatkan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi yang tanpa disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat Tang dkk. (2022). Permasalahan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama yang diperlukan dalam pembangunan regional. Secara teoritis, kesejahteraan memiliki keterkaitan erat dengan teori Pertumbuhan Ekonomi Regional. Teori ini menjelaskan bahwa pentingnya pertumbuhan ekonomi merupakan faktor pendorong dalam peningkatan kesejahteraan di suatu wilayah. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi tersebut dapat membuka lapangan kerja, pengembangan dan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pendapatan yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Muharja, 2023).

Perekonomian suatu negara sejatinya selalu mengalami perubahan setiap tahunnya karena adanya kegiatan perekonomian

yang berlangsung serta diupayakan semakin meningkat dari periode sebelumnya. Keberhasilan suatu negara dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dilihat dari besar kecilnya pendapatan yang diperoleh digambarkan dari laju pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat setiap tahunnya. Semakin besar pendapat yang diperoleh juga akan menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat pendapatan suatu negara juga akan menunjukkan bagaimana kondisi serta tingkat pertumbuhan ekonominya. Pada dasarnya, manfaat dari adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selamanya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sebagai negara berkembang, Indonesia kerap mengalami berbagai masalah dari ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi seperti adanya kesenjangan pendapatan yang tinggi antar masyarakatnya yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat sehingga akan berpengaruh pula pada tingkat kesejahteraan masyarakat Sutan dkk. (2023).

Persoalan pembangunan di Indonesia yang paling mendasar adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi permasalahan yang tak kunjung usai di berbagai daerah. Perhatian khusus terhadap penanggulangan kemiskinan menjadi fokus dari program-program kerja di seluruh daerah. Kemiskinan membuat proses pembangunan banyak mengalami permasalahan dan hambatan dengan tumbuhnya penyakit sosial ekonomi di dalam masyarakat (Arfiansyah, 2020).

Angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 turun. Upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah memiliki berbagai

program yang terintegrasi antara lain program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat dan berbasis pemberdayaan usaha kecil yang dijalankan berbagai tingkat pemerintahan daerah. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam pengurangan kemiskinan yaitu melalui berbagai program bantuan lain, melalui strateginya dalam pemberian bantuan sosial, diantaranya PKH (Program Keluarga Harapan), BLT (Bantuan Tunai Langsung), BSB (Bantuan Sosial Beras), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat), bantuan untuk usaha mikro dan kecil dan sebagainya (Sitepu dkk, 2022).

Pembangunan berbasis perdesaan memiliki peranan penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara. Desa menjadi pondasi utama dalam penyelenggaraan negara karena masyarakat secara mayoritas tinggal di dalamnya. Pembangunan desa akan mempercepat penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah berkurang. Sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa mempunyai posisi strategis sebagai basis pembangunan. Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia melahirkan implikasi pada kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Dalam kerangka otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa (Arfiansyah, 2020).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadikan desa sebagai prioritas pembangunan nasional. Tujuan utama dari undang-undang desa untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-undang tersebut telah menggeser pendekatan pembangunan terhadap desa dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan.

Prioritas pembangunan desa melalui dana desa menggeser pusat tata kelola pemerintahan dari pusat berpindah dan berkembang di daerah. Peningkatan kualitas pelayanan dan percepatan pembangunan serta pertumbuhan daerah menjadi tujuan utama perpindahan tata kelola pemerintahan. Desentralisasi tidak hanya hirarki pemerintahan tetapi desentralisasi fiskal pemerintah pusat ke pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun pemerintah desa. Desentralisasi fiskal sebagai kosekuensi otonomi daerah memberikan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa untuk membelanjakan anggarannya yang berorientasi pada kepentingan publik khususnya penanggulangan kemiskinan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Provinsi Aceh menyebutkan sebanyak 12 kabupaten/kota telah menuntaskan pencairan Dana Desa 2024 melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, bantuan langsung tunai (BLT), hingga ketahanan pangan masyarakat. Kepala DPMG Aceh mengatakan, 12 daerah yang sudah rampung 100 persen pencairan Dana Desa

di antaranya Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Barat, Banda Aceh, Simeulue, Sabang, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Bener Meriah, Gayo Lues, Subulussalam, Aceh Singkil, dan Bireuen. Tahun ini, Aceh mendapat alokasi total Dana Desa sebesar Rp4,95 triliun, termasuk insentif Dana Desa 2024 yang diperuntukkan bagi 6.497 desa yang tersebar di seluruh Aceh. DPMG Aceh mencatat 12 daerah yang sudah menuntaskan pencairan Dana Desa yaitu Pidie Jaya dengan total Rp169,16 miliar untuk 222 desa, Aceh Barat Rp236,11 miliar untuk 321 desa, Banda Aceh Rp77 miliar untuk 90 desa, Simeulue Rp106,57 miliar untuk 138 desa, Sabang Rp15,63 miliar untuk 18 desa. Selanjutnya, Kabupaten Aceh Jaya Rp128 miliar untuk 172 desa, Aceh Selatan Rp196,33 miliar untuk 260 desa, Bener Meriah Rp173,10 miliar untuk 232 desa, Gayo Lues Rp110,59 miliar untuk 136 desa, Subulussalam Rp69 miliar untuk 82 desa, Aceh Singkil Rp96,52 miliar untuk 116 desa, dan Bireuen Rp462,2 miliar untuk 609 desa. Sementara realisasi Dana Desa di 11 kabupaten/kota lainnya rata-rata sudah di atas 99 persen, bahkan ada yang 99,99 persen seperti Kabupaten Nagan Raya.

Tujuan penggunaan dana desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dalam mengelola sumber daya dan potensi yang ada dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan ternagkat dari kemiskinan. Dengan anggaran dana

desa, desa memiliki kesempatan mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran hasil produk masyarakat, pengembangan usaha peternakan, pertanian atau perkebunan masyarakat, pengembangan kawasan wisata, pembentukan BUMDes. Dengan penggunaan dana desa tersebut, masyarakat desa dapat meningkatkan perekonomiannya dan terangkat dari kemiskinan (Arfiansyah, 2020).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur melalui PDB. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi diukur dengan melalui PDB tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Pengukuran ini tidak dapat dilakukan setiap waktu, karena ketidakpastian data yang tersedia sebagai indikator pengukuran. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan berbentuk triwulan ataupun data pertahun. Pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif setiap tahunnya menimbulkan banyak pertanyaan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Menurut pandangan para ekonom klasik, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti jumlah penduduk, jumlah persediaan barang modal, luas lahan dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang dianut Sutan dkk. (2023).

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Desa sebagai organisasi pemerintah menjadi tolok ukur dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan pemerintah. Keberadaan desa memiliki kedudukan yang sangat penting karena sebagian besar wilayah Indonesia

berada di pedesaan sehingga harus mendapat perhatian khusus untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa desa mendapat wewenang untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri sehingga pemerintah desa memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud salah satunya adalah pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan desa (Khasanah dan Marisan, 2022).

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini, desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman desa diatas menempatkan desa sebagai suatu organisasi yang secara politis memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Pemerintah daerah diberikan hak untuk mengembangkan desa sesuai dengan hakhak kolektif desa. Posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas (Rahayu, 2017).

Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2010 bahwa sekitar 50,21% atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman pedesaan (BPS, 2015). Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, diberikan kewenangan yang mencakup;

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan Urusan pemerintahan

lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Jika dilihat dari masalah kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan pada desa maka bantuan-bantuan pada masyarakat seperti BLT, PKH, posyandu dan bantuan lainnya merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan suatu desa. Program atau bantuan yang di berikan oleh pemerintah, Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut (Ibrahim dkk., 2023).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah alokasi untuk membiayai sebagian program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa, serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan disetiap desa adalah adanya

kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Magal dkk., 2021).

Alokasi Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi Dana Desa mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanafaatannya.

Alokasi Dana Desa juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut,

pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Alokasi Dana Desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa (Kusumawardani dan Alfiyah, 2022).

Alokasi dana desa tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja faktanya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan suatu perubahan yang didanai oleh alokasi dana desa masih dapat dikatakan rendah. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Hal ini juga disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari pemerintah dan masyarakat yang kurang. Oleh karena itu, perlu diketahui sejauh mana pengelolaan Dana Desa dalam program desa sehingga tujuan pemerintah mengalokasikan dana pemerintah pusat dan daerah bisa membantu program desa dan tujuan pemerintah terwujud demi kesejahteraan masyarakat.

Selain anggaran dana desa yang didapatkan oleh desa, masalah pengelolaan keuangan desa juga dapat mengukur suatu kesejahteraan masyarakat desa, salah satunya transparansi terhadap pengelolaan dana desa. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal *accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2002). Transparansi diartikan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara berkala kepada masyarakat luas, sehingga prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang luas tentang keuangan daerah. Dalam hal ini, semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan, terutama masyarakat di wilayahnya (Khasanah dan Marisan, 2022).

Transparansi (keterbukaan) merupakan salah satu prinsip yang harus digunakan dalam mengelola keuangan desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya tidak sedikit dan setiap tahun bertambah maka dibutuhkan keterbukaan dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan

secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa (PERDES). Pengelolaan keuangan desa yang akuntabilitas dan transparan memiliki dampak positif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat karena meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat desa. Demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa juga dibutuhkan aparatur pemerintah desa yang handal agar pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih terarah dan akuntabel (Khasanah dan Marisan, 2022).

Transparansi dalam sistem pengelolaan dana pemerintah desa dimaksudkan sebagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan terbuka. Prinsip transparansi menjamin setiap orang agar memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, semuanya harus dilaksanakan dengan berdasarkan asas akuntabel, transparan, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri 113 tahun 2014).

Adanya transparansi pengelolaan keuangan dana desa akan membuat tingkat penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi menjadi lebih minim, karena masyarakat bias memantau/mengawasi setiap hal yang dilakukan oleh aparatur desa terkait pengelolaan keuangan desa sehingga kecenderungan aparatur desa untuk berbuat curang menjadi lebih kecil. Apabila pengelolaan

keungan desa dilakukan dengan dan sesuai yang diharapkan, tentu dana desa tersebut akan digunakan untuk kepentingan masyarakat desa, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi tinggi (Wardani dan Utami, 2020).

Kajian mengenai keterkaitan antara Alokasi Dana Desa dengan kesejahteraan masyarakat desa telah diteliti oleh beberapa penelitian sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim dkk, (2023) menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan pada penelitian. Khasanah dan Marisan (2022) menjelaskan bahwa variabel transparansi berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Perbedaan hasil yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, membuat peneliti ingin melakukan penelitian yang sama untuk mengetahui bagaimana pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa yang ada di Desa Neusu Jaya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Banda Aceh”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh alokasi dana desa (ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Banda Aceh
2. Bagaimana transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Banda Aceh
3. Bagaimana pengaruh alokasi dana desa (ADD) dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Banda Aceh

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa (ADD) terhadap kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) terhadap kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh
3. Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa (ADD) dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan Masyarakat di Kota banda Aceh

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu ekonomi serta menambah kajian ilmu ekonomi serta menambah kajian ilmu ekonomi khususnya dalam ekonomi pembangunan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini juga penelitian ini dapat membantu pihak-

pihak lain dalam penyajian informasi terkait pengadaan penelitian yang serupa.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi lembaga-lembaga yang terkait dalam pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dan transparansi dana desa di Kota Banda Aceh.

